



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI IX DPR RI
(BIDANG DEPARTEMEN KESEHATAN,
DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
BADAN PENGAWAS OBAT & MAKANAN, BKKBN DAN BNP2TKI)**

Tahun Sidang	: 2007-2008
Masa Persidangan	: III
Jenis	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Kepala BNP2TKI
Sifat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Senin, 25 Februari 2008
Waktu	: Pukul 16.00 WIB – selesai
Ketua Rapat	Dr. Ribka Tjiptaning/Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris	: Dra. Tri Udiartiningrum/Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gd. Nusantara I DPR RI, Jakarta
Acara	: 1. Membicarakan masalah-masalah aktual yang berhubungan dengan bidang tugas BNP2TKI; 2. Membicarakan hasil kunjungan kerja Komisi IX DPR RI ke Luar Negeri; 3. Lain-lain.
Anggota yang hadir	: 31 Anggota dari 51 Anggota Komisi IX DPR RI, 4.orang Ijin, 2 orang Sakit.

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Kepala BNP2TKI dibuka oleh Ketua Rapat pukul 16.25 WIB dan sesuai dengan Pasal 99 ayat (1) rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Paparan Kepala BNP2TKI mengenai pertanyaan tertulis Komisi IX DPR RI masalah-masalah aktual yang berhubungan dengan bidang tugas BNP2TKI, dan masalah-masalah lainnya.

KESIMPULAN / KEPUTUSAN

Setelah mendengarkan usulan/pendapat dari Anggota Komisi IX DPR RI dan jawaban dari Kepala BNP2TKI, maka kesimpulan Rapat Dengar Pendapat hari ini, adalah :

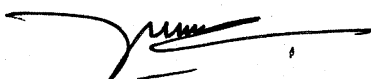
1. Komisi IX DPR RI mendukung BNP2TKI untuk mengupayakan penghapusan biaya pembuatan kembali paspor (denda) bagi seluruh TKI yang dideportasi dari luar negeri dan akan mengurus paspor kembali.

2. Komisi IX DPR mendorong BNP2TKI untuk secara berkesinambungan meningkatkan perlindungan dan memperbaiki kualitas pelayanan penempatan TKI di Malaysia dan seluruh negara tujuan penempatan mengingat masih tingginya kasus-kasus TKI yang terjadi, terutama permasalahan TKI ilegal.
3. Komisi IX DPR RI mendorong BNP2TKI melakukan kajian khusus untuk mengetahui secara jelas akar masalah terjadinya kasus-kasus TKI sejak masa perekrutan, masa penempatan sampai purna penempatan agar dapat dilakukan kebijakan-kebijakan yang secara langsung dapat mengeliminasi terjadinya masalah yang sama.
4. Komisi IX DPR RI mendukung kebijakan pemeringkatan/rating terhadap BLK-LN yang dilakukan BNP2TKI sekaligus mendorong BNP2TKI untuk meningkatkan kualitas Pembekalan Akhir Pemberangkatan TKI.
5. Komisi IX DPR RI mendesak BNP2TKI untuk menindak tegas keberadaan pihak-pihak yang merugikan TKI di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta termasuk menertibkan pemerasan TKI pada jalur-jalur transportasi TKI sejak dari Bandara sampai ke kampung halaman.
6. Komisi IX DPR RI mendorong BNP2TKI agar segera berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengupayakan pembentukan BP3TKI di daerah-daerah yang belum terdapat BP3TKI dengan prioritas pada daerah-daerah yang potensial pengiriman TKI dan daerah transit pengiriman TKI.
7. Komisi IX DPR RI mendukung BNP2TKI untuk melakukan tindakan tegas terhadap seluruh PPTKIS ilegal dan jika diperlukan BNP2TKI mengusulkan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pencabutan ijin PPTKIS resmi tetapi tidak menjalankan seluruh prosedur penempatan TKI yang berlaku.
8. Komisi IX DPR RI meminta BNP2TKI agar secara berkesinambungan melakukan sosialisasi informasi tentang sistem dan mekanisme penempatan TKI di daerah-daerah asal TKI sehingga CTKI dapat terhindar dari calo, sponsor dan PPTKIS ilegal.
9. Komisi IX DPR RI dan BNP2TKI sepakat perlunya dilakukan Pertemuan tripartit melibatkan Komisi IX DPR, BNP2TKI dan DEPNAKERTRANS untuk membicarakan tentang kejelasan batas-batas tugas dan kewenangan terkait penempatan dan pelayanan TKI agar tidak terjadi tumpang tindih dan atau kekaburan kewenangan antara BNP2TKI dengan DEPNAKERTRANS.
10. Komisi IX DPR RI dan BNP2TKI sependapat tentang perlunya dibentuk Panitia Kerja (Panja) oleh Komisi IX DPR RI untuk melakukan evaluasi terhadap Konsorsium Asuransi TKI agar dapat ditentukan formula baru pelaksanaan perlindungan TKI melalui asuransi.

Rapat ditutup pukul 18.30 WIB

Jakarta, 25 Februari 2008

Kepala BNP2TKI,



Moh. Jumhur Hidayat

Komisi IX DPR RI
Wakil Ketua,

Dr. Ribka Tjiptaning